

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah sosial suatu bangsa tidak diragukan lagi terkait erat dengan sistem pendidikannya. Begitu pula Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan keragaman ras, suku, dan budaya, memiliki banyak hal yang ditawarkan dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, mulai dari sekolah-sekolah tradisional seperti Surau di Sumatera Barat, Rangkang di Aceh, dan Langgar di Jawa Timur, hingga yang lebih modern. lengkap dengan manajemen dan infrastruktur yang canggih, termasuk Pondok Modern Gontor, al-Zaitun, bahkan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), di antara lembaga lainnya.

Seiring dengan perkembangan isu pendidikan global, manajemen pendidikan Islam semakin berkembang. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan menyusun berbagai strategi untuk mempersiapkan lembaga pendidikan yang berada di bawah payungnya agar dapat bersaing secara efektif di pasar

layanan pendidikan. Dalam rangka menjaring pelanggan yang membutuhkan berbagai layanan pendidikan yang berkualitas, upaya pengemasan lembaga pendidikan semakin inovatif dan kompetitif. Pengelola lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama, yang harus tetap eksis untuk bersaing dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan negeri yang telah berdiri di berbagai pelosok tanah air, dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi semakin selektifnya orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. untuk anak-anak mereka.

Di Indonesia, madrasah atau lembaga pendidikan Islam lebih muda dari pesantren. Pada abad ke-20, Madrasah Mamba'ul Ulum Surakarta dibuka pada tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah Sumatera Barat dibuka pada tahun 1909. Madrasah merupakan tahap pembaharuan dan pengembangan pada saat itu karena merupakan fenomena modern. lembaga pendidikan Islam tradisi.<sup>1</sup> Untuk memfasilitasi bidang keilmuan agama yang dipadukan dengan ilmu umum dan memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat, Madrasah sebagai pendatang harus dikembangkan dengan mengacu pada pendahulunya.

---

<sup>1</sup> Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, *Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah*, (Banten: Kanwil Kemenag Provinsi Banten),...4

Selain itu, madrasah adalah representasi dari realitas mereka yang mencari model untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada. Ada tiga bagian reformasi: 1) menjadikan sistem pesantren salafi sebagai pendidikan non formal, 2) mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sistem pembelajaran formal, dan 3) bekerja sama dalam sistem pendidikan modern dan sistem pesantren tradisional.<sup>2</sup> Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memadukan bidang keilmuan agama dan umum merupakan alternatif kebijakan yang tepat dalam konteks kekinian. Karena tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semakin tinggi seiring laju perubahan yang semakin cepat. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan pendidikan masyarakat yang lebih up to date dengan melestarikan konten ilmu agama.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelaslah bahwa keinginan untuk mengembangkan madrasah sudah ada sejak madrasah berdiri dengan menghadirkan strategi-strategi yang memungkinkan madrasah bertahan dengan sedikit demi sedikit beradaptasi dengan sistem pendidikan modern. sehingga

---

<sup>2</sup> Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, *Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah*, Banten: Kanwil Kemenag Provinsi Banten,...5

penguasaan yang dicapai tidak hanya dalam segi agama tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Dalam hal ini, pengelola lembaga pendidikan atau madrasah dapat mencapai kualitas terbaik dalam memberikan layanan pendidikan dan menjamin mutu madrasah tersebut, yang dapat berujung pada berkembangnya madrasah. Taqwa dan berlomba dalam kebaikan, jika dimaknai dalam program madrasah, niscaya akan bermuara pada peningkatan layanan dan penjaminan mutu madrasah di tingkat lokal, nasional, dan global. Tentunya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan konsep tersebut di atas sebagai strategi untuk mengembangkan lembaganya.

Sesuai dengan amanatnya, kebijakan pemerintah UU No. cenderung diskriminatif dalam hal pengelolaan dan pembiayaan madrasah, bahkan dalam hal kurikulum. Ini tetap keputusan pemerintah pusat, meski otonomi daerah sudah ada. Perbedaan pemahaman tentang pendidikan Islam telah memungkinkan hal ini terjadi.<sup>3</sup> Akibatnya, perkembangan awal Madrasah biasanya lamban dan jauh tertinggal dari sekolah negeri. Ada diskriminasi, dan tampaknya pemerintah hanya mendukung dan memfasilitasi

---

<sup>3</sup> Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, *Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah*, Banten: Kanwil Kemenag Provinsi Banten,..9

pengembangan sekolah umum. Sedangkan madrasah dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat dan pimpinannya. Madrasah, di sisi lain, memiliki posisi unik dalam manajemen berkat UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah.

Sebagai organisasi yang diatur oleh kementerian agama, madrasah harus memilih antara dua peran: secara fisik, sebagai lembaga pendidikan, diatur oleh pemerintah daerah, dan dalam hal kandungan keilmuan agama, diatur oleh pemerintah pusat.<sup>4</sup> Madrasah dapat menggunakan ini sebagai peluang atau sebagai tantangan. Sudah pasti setiap madrasah memiliki muatan keilmuan yang sama, khususnya dalam hal keagamaan, jika dilihat dari segi muatan keilmuan keagamaan yang ditangani langsung oleh pusat. Hal ini memastikan output memperoleh wawasan keagamaan dengan konsep yang sama. Namun, sulit bagi setiap daerah untuk mengembangkan pengelolaan madrasah di pemerintah daerah berdasarkan karakteristiknya masing-masing.

---

<sup>4</sup> Umi Kultsum, *Dampak Implementasi Otonomi Daerah Pada Madrasah (Studi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang)*, (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah , 2017), 2

Undang-undang otonomi daerah mulai tampak di lembaga pendidikan, yang masing-masing menunjukkan keunggulannya dalam input, proses, dan output pendidikan. Selain itu, madrasah harus cepat merespon gerakan ini agar tidak ditinggalkan oleh keinginan masyarakat akan layanan pendidikan yang lebih baik. meskipun Kementerian Agama pusat terutama bertanggung jawab atas isi madrasah, administrator madrasah memiliki otoritas manajemen penuh. Kebijakan desentralisasi pendidikan setidaknya memiliki empat dampak yang menguntungkan, yaitu: 1) peningkatan kualitas, 2) efisiensi keuangan dan administrasi, 3) perluasan dan pemerataan pendidikan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, agar madrasah yang dikelola memiliki keunggulan yang mampu bersaing dengan madrasah lain maupun lembaga pendidikan umum, sekurang-kurangnya pengelola madrasah di tingkat satuan pendidikan harus benar-benar memahami tata kelola madrasah dan strategi pengembangan madrasah yang mumpuni.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan pendidikan dasar dan menengah dengan muatan mata pelajaran

---

<sup>5</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),...236

umum serta pendidikan agama dengan porsi yang lebih kecil, karena lembaga negara yang menyelenggarakan layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama memiliki kemas program pendidikan yang berbeda. mereka menawarkan. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan menawarkan pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah materi pelajaran umum yang hampir sama dan proporsi materi pelajaran agama yang lebih besar.

Untuk menjawab tantangan masa kini, madrasah senantiasa melakukan inovasi, perubahan, dan pembaharuan. Program peningkatan dan pengembangan kualitas selalu dilakukan. Di tingkat nasional dan internasional, prestasi telah diraih dari tahun ke tahun.<sup>6</sup> Di Indonesia, madrasah telah berkembang menjadi sebuah entitas tersendiri yang sangat dihargai fungsi, kontribusi, keberadaan, dan kualitasnya.

Madrasah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) mengutamakan mutu, 2) mengubah pola pikir layanan pendidikan, 3) mengubah paradigma pengelolaan madrasah, 4) menjamin mutu

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, 2016, *Ensiklopedia Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah), ...iii

pendidikan, 5) melaksanakan penjaminan mutu secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan<sup>7</sup> Dibawah pengawasan kemendikbud, madrasah dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang minimal sama baiknya dengan sekolah karena merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang setara dengan pendidikan umum.

Agar penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat berjalan efektif dan efisien serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, maka pengelola madrasah harus menafsirkan dengan baik keterpaduan keilmuan antara ilmu agama dan bidang keilmuan umum. Sejarahwan pendidikan juga melihat kebangkitan madrasah sebagai cara untuk menghidupkan kembali pendidikan Islam dan memperbaiki sistem pesantren agar lulusannya memiliki lebih banyak kesempatan.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pengembangan pendidikan di madrasah yang secara konseptual dapat diterima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa, dan dapat diterima secara politis oleh masyarakat memerlukan kajian normatif-filosofis serta pemahaman

---

<sup>7</sup> Ridwan Abdullah Sani, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018),...3

<sup>8</sup> Deden Saeful Ridhwan, & Novri Dewita, 2016, *Dinamika dan Eksistensi Madrasah Dalam Pendidikan Islam*, Tangerang Selatan: CENDEKIA: Jurnal Pendidikan, Humaniora, dan Sains, Vol.2, No.2, September-Desember, Pp. 17



terhadap potensi strategis dan lingkungan.<sup>9</sup> Akibatnya, manajemen strategis memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan strategis di madrasah. Hal ini membantu masyarakat secara keseluruhan menerima madrasah secara konseptual, kultural, dan politis, dan brand madrasah pada akhirnya akan disukai dan diminati oleh banyak orang.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan madrasah sangat beragam, yang sebagian besar sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari berbagai aspek input, proses, output, dan outcome. Musfah juga mengatakan bahwa kepemimpinan madrasah masih lemah dan kurang memperhatikan kualitas karena tidak banyak berbuat. Mereka juga tidak memiliki cukup uang, sehingga pengelolaan madrasah menjadi kurang profesional. Pemerintah hanya memberikan sedikit uang kepada madrasah dan tidak memberikan semuanya kepada mereka, dan komite hanya memainkan peran administratif.<sup>10</sup> Begitu pula di Provinsi Banten, pedoman masalah madrasah mencakup masalah subsidi, yayasan, tenaga kerja, dan program pendidikan.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2019),..10

<sup>10</sup> Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), ..259

Setiap program pendidikan, termasuk madrasah, pasti akan menemui permasalahan yang berkaitan dengan sistem, kepemimpinan, keuangan, administrasi, kurikulum, dan aspek lainnya. Isu-isu tersebut kemudian dijadikan dasar refleksi dan evaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan di madrasah. sehingga upaya atau strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan di masa depan untuk mengatasi masalah ini. sehingga layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah dapat ditingkatkan secara konsisten.

Sesuai dengan renstra Ditjen Pendis, seluruh satuan pendidikan madrasah harus terakreditasi pada tahun 2014 sebagai sarana penetapan standar mutu dan evaluasi satuan pendidikan, termasuk madrasah,<sup>11</sup> dan sekurang-kurangnya 50% terakreditasi B. Sementara statistik pendidikan Islam menunjukkan bahwa terdapat 46.742 madrasah terakreditasi dari 73.786 madrasah yang ada hingga tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa 36,65% madrasah belum terakreditasi.<sup>12</sup> Jumlah ini menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2020),...185

<sup>12</sup> Bidang Pendidikan Madrasah, 2016, *Madrasah dalam Angka dan Wajah Madrasah*, Banten: Kanwil Kemenag Provinsi Banten,..20

masih banyak madrasah yang belum terakreditasi, yang sebagian besar hanya mendapat peringkat B. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa kualitas madrasah masih di bawah standar. Penyebabnya banyak, antara lain kepemimpinan yang tidak memadai, layanan pendidikan yang tidak memadai, dan sistem yang rusak yang perlu diperbaiki. Untuk memberikan gambaran bagi madrasah agar mengikuti kaidah baku penyelenggaraan madrasah yang baik, yang juga akan membuahkan hasil positif, diperlukan terobosan dan keteladanan.

Namun jika melihat kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain 1) Kelemahan manajemen, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah lembaga pendidikan harus didukung oleh sumber daya manusia, manajemen, dan dana jika ingin terus berfungsi dalam lingkungan yang semakin kompetitif saat ini; (2) Perguruan Tinggi Islam masih belum mampu mengimplementasikan Islam sesuai dengan cita-citanya secara maksimal. Sebaliknya, masyarakat masih memandang lembaga pendidikan Islam sebagai penopang utama bagi kelangsungan cita-cita Islam, yaitu rahmat bagi semesta alam;

(3) Perguruan Tinggi Islam masih dianggap belum mampu mentransformasikan Islam. Fakta bahwa masyarakat Islam telah berhenti mengamalkan ajaran agamanya di luar tataran simbolik dan formal; 4) Kecenderungan masyarakat untuk membangun masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, kemitraan, kejujuran, dan sebagainya; dan 5) Perguruan Tinggi Islam, bahkan di perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan Islam, kurang menarik bagi masyarakat umum. Sekolah di lembaga pendidikan non-Islam umumnya disukai oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek pertumbuhan yang sangat krusial dalam segala bidang kehidupan. Sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan suatu organisasi atau lembaga. Demikian pula, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, mutakhir, dan kompeten. Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi

---

<sup>13</sup> M. Shabir, Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Lentera Pendidikan*, VOL. 16 NO. 2 DESEMBER 2021: 166-1771- 166

sangat diperlukan jika ingin memajukan bidang tersebut. Ini tidak berbeda: jika kita ingin memajukan Indonesia, kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berpengetahuan (dalam hal ini guru). Selain itu, mereka akan mendidik dan mendidik generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi guru sangat diharapkan.

Menurut Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Pasal 10, istilah "kompetensi pedagogik", "kompetensi pribadi", "kompetensi sosial", dan "kompetensi profesional" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup semua aspek kompetensi guru. Namun ada satu keterampilan yang perlu dimiliki dan ditingkatkan juga: kompetensi spiritual guru.

Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya, sejumlah persyaratan perlu dipenuhi, salah satunya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Kebijakan yang dapat mendorong terciptanya guru yang

berkompeten dan berkualitas terus dikembangkan hampir di setiap bangsa di muka bumi ini.<sup>14</sup>

Penulis membatasi pembahasan pada kebijakan pendidikan politik yang dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama karena uraian tersebut terkesan sangat luas sehingga perlu dilakukan investigasi (Kemenag). Penulis lebih memfokuskan pada implementasi renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih adanya kesenjangan antara madrasah yang diidealkan masyarakat muslim dengan realitas sebagian besar madrasah yang belum memiliki keunggulan komparatif
2. Kurangnya kesadaran guru terhadap tugas dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik yang profesional.
3. Profesionalitas guru belum memenuhi standar pendidikan
4. Kualifikasi latar belakang pendidikan guru yang belum sesuai dengan bidang dan belum memadai dengan pendidikan keguruan.

---

<sup>14</sup> Ronny Mugara, "Meningkatkan Kompetensi Guru melalui Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*: 2

5. Belum dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga dalam pelaksanaan pendidikan tidak sepenuhnya terlaksana secara profesional.
6. Guru masih gagap dalam beradaptasi dengan kemajuan iptek dan fenomena sosial kemasyarakatan di era globalisasi.
7. Guru hanya menjadi robot kurikulum pendidikan yang kurang minat untuk belajar mengembangkan.
8. Mutu pendidikan madrasah yang dianggap masih tertinggal dari lembaga pendidikan umum
9. Pendidikan tidak terlepas dari bias fenomena era globalisasi, termasuk pendidikan Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat uraian tersebut rasanya begitu luas yang perlu dikaji, maka dari itu disini penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru?
2. Bagaimana implementasi rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru?

3. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru?
4. Apa saja kendala yang menghambat peningkatan kualitas guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten?

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah-masalah yang menjadi pokok permasalahan, maka supaya tidak terlalu luas dan melebar dalam pembahasannya maka penulis mengambil batasan masalah dan fokus penelitian pada:

1. Menjelaskan rumusan Renstra Kementerian Agama Provinsi Banten dalam pengembangan guru.
2. Menjelaskan tentang praktik manajemen dalam pembinaan guru profesional oleh Kementerian Agama Provinsi Banten.
3. Mendeskripsikan hubungan Renstra Kementerian Agama Provinsi Banten dalam peningkatan mutu guru.



4. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Renstra Kementerian Agama Provinsi Banten madrasah di Provinsi Banten.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru.
2. Untuk mengetahui implementasi rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru.
3. Untuk mengetahui sistem pengawasan dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru.
4. Untuk mengetahui kendala yang menghambat peningkatan kualitas guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu manajemen pendidikan islam yang dikaitkan dengan ilmu Manajemen Strategi
  - b. Sebagai bahan penelitian pada topik manajemen strategis dalam mengembangkan kualitas guru
  - c. Untuk menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan kajian ini dan alternatif kajian secara teoritis maupun praktis dalam bidang manajemen pendidikan
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan gambaran tentang strategi kementerian agama dalam mengembangkan madrasah
  - b. Dapat memberikan konsep, dan analisa yang mendalam tentang pentingnya manajemen strategis dalam mengembangkan madrasah negeri dan swasta.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan tesis ini, penulis masih menggunakan rujukan-rujukan atau referensi dari karya-karya ilmiah lain, seperti tesis, jurnal, ataupun karya-karya ilmiah yang masih berkaitan

dengan pokok masalah yang penulis teliti selain dari buku-buku yang menjadi sumber. Sebagai tinjauan pustaka yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis Saeful Anam yang berjudul Manajemen Strategis Kementerian Agama Kabupaten Serang Dalam Pengembangan Madrasah dalam penelitiannya formulasi manajemen strategis Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam Pengembangan Madrasah dilaksanakan dengan sistematis, terarah dan terukur. Proses formulasi baik perumusan visi misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, pemilihan strategi, kunci keberhasilan dan penetapan sasaran tujuan dan strategi dilaksanakan dimulai dengan pembentukan tim penyusun rencana strategis, melaksanakan rapat penyusunan rencana strategis, dan mengesahkan rencana strategis serta menghasilkan pedoman manajemen strategis yang dapat mengembangkan madrasah menjadi lebih baik lagi dan dijadikan landasan dalam melaksanakan proses implementasi rencana strategis. Implementasi Manajemen Strategis dalam pengembangan madrasah telah dilaksanakan dengan baik melalui tiga tahap yaitu rencana program dan kegiatan, penganggaran dan sistem pelaksanaan, pemantauan dan pengawas.

2. Tesis Siti Aminah, yang berjudul: Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas” dalam penelitiannya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas, termasuk penguatan kompetensi guru madrasah. Dalam upaya penguatan kompetensi guru madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai peran sebagai Pembina Guru Madrasah, Penyedia Layanan Pendidikan, penjamin kesejahteraan guru madrasah, penyelenggara program pendidikan, pengampu guru madrasah, lembaga pengembangan guru madrasah, dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai pengawas guru madrasah. Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas ini memiliki kelemahan, di mana ada beberapa ruang lingkup yang tidak bisa dicapai oleh peneliti. Salah satunya peneliti tidak menjumpai secara langsung pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baik diklat, *workshop*, maupun pembinaan lainnya.

3. Tesis Muhammad Husni Muslim yang berjudul Kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah se Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Kompetensi professional Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah se Kota Yogyakarta yang berjumlah tiga belas orang ini sudah cukup baik, namun perlu tingkatan lagi terutama dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Sebab baru empat dari tiga belas orang guru PAI yang telah melanjutkan ke jenjang magister. Namun disamping itu, secara keseluruhan mereka aktif pada setiap pelatihan-pelatihan dan aktif juga mengikuti kelompok kerja guru (KKG). Selain itu, mereka juga perlu diperhatikan dan di tingkatkan lagi dalam memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari terutama dalam proses pembelajaran sebagai sarana pembelajaran. Serta hal yang paling urgen adalah penempatan tugas guru Pendidikan Agama Islam perlu dipertimbangkan lagi, sebab mereka sangat qualified ketika menyampaikan materi yang sesuai *background* pendidikan

mereka namun belum maksimal ketika menyampaikan materi lainnya terutama matematika. Kebijakan Kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi professional guru PAI di MI se kota Yogyakarta meliputi: 1) Pemberdayaan Pengawas madrasah, 2) Pemberdayaan Kelompok Kerja Kepala Madrasah, dan 3) Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru/KKG, serta 4) Pemberdayaan guru PAI. Keempat butir kebijakan ini masih perlu diperhatikan dan dikembangkan secara lebih serius lagi yang tentunya harus dilakukan secara kontiniu.

4. Tesis Adiyanto yang berjudul Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi kementrian agama untuk peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah (MI) di kabupaten cilacap agar dapat unggul secara akademik dan non akademik serta memenuhi 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013 adalah dengan meningkatkan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut melalui peningkatan mutu guru sebagai pengajar, peningkatan model

dan media belajar. Melakukan pemberdayaan forum kedinasan yang berkaitan dengan madrasah ibtidaiyah (MI) seperti POKJAWIS, KKMI dan KKGMI serta melakukan peningkatan standar pelayanan minimal.

5. Tesis Catur Hari Wibowo yang berjudul Problematika Profesi Guru dan Solusinya Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di MTs Negeri Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) problematika guru terdiri dari problem internal, meliputi: (a) kompetensi pedagogis, yaitu lemahnya menguasai kelas, miskin inovasi dan kreativitas, minat baca rendah, kurang menguasai teknik penilaian yang baik dan guru kurang bahkan tidak menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, (b) kompetensi profesional, yaitu kurang menguasai materi, (c) kompetensi kepribadian, yaitu sikap kurang mencintai pada profesi. Sedangkan problem eksternal, meliputi: besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas dan sumber belajar yang terbatas, disiplin dan perpustakaan yang tersedia. 2) solusi/upaya yang dilakukan mengatasi problematika tersebut adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia maupun

fasilitas yang dimiliki guna menunjang peningkatan kualitas pendidikan, antara lain: untuk problem internal (a) kompetensi pedagogis, dilakukan dengan workshop/lokakarya/penataran, pendidikan dan latihan fungsional (*on-service education*), *In House Training*, supervisi/pengawasan, kegiatan jurnalistik dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi serta studi banding, (b) kompetensi profesional dilakukan dengan penelitian tindakan/*collaboration action research* (CAR), kegiatan KKG/MGMP (*inservice education*), dan (c) kompetensi kepribadian melalui percakapan pribadi (*personal approach*), *problem solving*, evaluasi diri (*self evaluation*), dan bagi guru atau staf diberi kesempatan untuk melanjutkan studi belajar ke jenjang yang lebih tinggi (*pre-service education*). Sedangkan untuk problem eksternalnya dilakukan dengan membuka kelas khusus, membuat kelas darurat, menerapkan pembelajaran PAIKEM dan media berbasis TI, mengoptimalkan alat peraga/praktik, memanfaatkan bahan ajar/modul sendiri, keteladanan kepala madrasah, masuk-keluar kelas tepat waktu dan mengoptimalkan fungsi perpustakaan.



## **H. Kebaruan Penelitian**

Dari beberapa jurnal yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas rencana strategis Kementerian Agama dilihat dari profesionalisme guru khususnya diwilayah Provinsi Banten, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.